



**SYURA: JOURNAL OF LAW**

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

---

---

## **Prospek Politik Islam dalam Lanskap Demokrasi Indonesia Kontemporer**

**Madhur M**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

madhurmalif@gmail.com

---

### **Abstract**

**Keywords:**

*Islamic Parties,  
Politics,  
Democracy,  
Indonesia,  
Political Ideology*

Islamic political parties represent an integral part of Indonesia's pluralistic and democratic political landscape. This study addresses the core issue of how Islamic political parties have evolved ideologically and politically in the context of Indonesia's post-reform democratic system. The central objective of this research is to analyze the ideological foundation, development trajectory, and socio-political relevance of Islamic parties in Indonesia, particularly in terms of their role in promoting Islamic values while navigating a secular democratic framework. Using a qualitative descriptive method with a literature-based approach, this study collects data from academic books, journal articles, and relevant documents. It examines key parties such as the Prosperous Justice Party (PKS), the United Development Party (PPP), and the National Mandate Party (PAN), all of which represent various streams of Islamic political thought and influence. The findings reveal that Islamic political parties in Indonesia, while rooted in Islamic teachings emphasizing social and economic justice, face ongoing challenges in balancing religious identity with broader national interests. Although they actively participate in electoral politics and have shown fluctuating but sustained electoral performance, criticisms persist regarding their perceived overemphasis on religious issues at the expense of socio-economic development. This research contributes to the understanding of how Islamic political parties adapt to changing democratic dynamics in Indonesia. It also provides insights for

---

---

future political engagement strategies that harmonize religious values with inclusive national development goals.

---

### Abstrak

---

**Kata Kunci:** *Partai politik Islam merupakan bagian penting dari lanskap politik Partai Islam, Indonesia yang pluralistik dan demokratis. Penelitian ini mengangkat Politik, permasalahan mengenai bagaimana partai politik Islam berkembang secara Demokrasi, ideologis dan politis dalam konteks sistem demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Ideologi Politik landasan ideologi, arah perkembangan, dan relevansi sosial-politik partai-partai Islam di Indonesia, khususnya dalam perannya menyuarakan nilai-nilai Islam di tengah kerangka negara yang menganut sistem demokrasi sekuler. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada partai-partai Islam utama seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang masing-masing merepresentasikan aliran dan pengaruh pemikiran Islam yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun partai-partai Islam berakar pada ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial dan ekonomi, mereka menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan identitas keagamaannya dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Walaupun aktif dalam proses pemilu dan menunjukkan kinerja elektoral yang bervariasi namun stabil, partai-partai ini kerap mendapat kritik karena dianggap terlalu fokus pada isu-isu keagamaan dan kurang memperhatikan persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika adaptasi partai politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia serta arah strategi politik yang lebih inklusif ke depan.*

---

Received: 16-06-2025, Revised: 09-07-2025, Accepted: 12-07-2025

---

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.437>

© Syura: Journal of Law  
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum  
Banyuwangi Pamekasan, Indonesia



This is an open access article under  
licensed [Creative Commons Attribution  
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---

## Pendahuluan

Partai politik memiliki posisi dan peran yang cukup penting di dalam sistem demokrasi. Partai politik menjadi sarana penghubung yang begitu strategis antara hubungan pemerintah dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*".<sup>1</sup> oleh sebab itu, partai politik menjadi pilar yang sangat penting untuk diperkuat tingkat pembangunannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap perjalanan sistem politik yang demokratis.<sup>2</sup>

Peranan partai politik dalam kegiatan bernegara ialah sebagai media dan wahana yang tentu sangat menonjol di samping faktor lain seperti pers dan sebagainya. Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan

keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels, dia mengatakan bahwa "organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif".<sup>3</sup>

Hubungan Islam dan politik mulai ada sejak kemunculan Islam, namun pembahasan secara sistematis baru terjadi setelah Indonesia merdeka. Pembahasan begitu transparan saat rapat BPUPKI berlangsung dan berpuncak pada terbitnya Piagam Jakarta. Tetapi relasi antara Islam dan politik akhirnya tidak diabadikan, sehingga jalan alternatifnya dengan membentuk Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Partai politik telah lama dianggap sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Sejumlah pemikir klasik seperti E.E. Schattschneider (1942) menegaskan

<sup>1</sup> Schattschneider, E. E., *The Semisovereign People: A realist's view of democracy in America*, (Illionis: the Dryden Press Hinsdale, 1975).

<sup>2</sup> Assiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Medan: Sekretariat

Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 153.

<sup>3</sup> Robert Michels, *Partai Politik: Kecendrungan Oligarkis dalam Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 23.

bahwa “political parties created democracy,” menunjukkan betapa sentralnya peran partai dalam menciptakan dan mengarahkan demokrasi. Dalam konteks Indonesia, partai politik berperan sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan negara, menjadi wahana yang menghubungkan masyarakat dengan institusi-institusi kenegaraan (Michels, 1911). Sejak kemerdekaan, diskursus hubungan antara Islam dan politik telah berlangsung panjang, dimulai dari perdebatan dalam BPUPKI hingga lahirnya Piagam Jakarta, yang kemudian mengalami kompromi dalam bentuk penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Namun demikian, partai politik Islam tetap eksis dan berkembang sebagai cerminan dari dinamika Islam politik yang terus berproses dalam kerangka demokrasi Indonesia.

Sebagian besar kajian terdahulu masih fokus pada aspek historis atau ideologis hubungan antara Islam dan politik di Indonesia, serta perdebatan normatif mengenai posisi Islam dalam negara Pancasila.

Namun, belum banyak kajian yang secara komprehensif membahas prospek partai politik Islam dalam konteks demokrasi elektoral kontemporer, termasuk tantangan modern seperti segmentasi pemilih, perubahan persepsi generasi muda, serta penyesuaian strategi partai dalam era digital dan media sosial. Selain itu, sebagian kajian masih melihat partai Islam dari sisi identitas normatifnya, tanpa menelaah bagaimana transformasi politik dan strategi partai dilakukan untuk merespons tuntutan zaman.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menganalisis prospek partai politik Islam di Indonesia melalui pendekatan ideologis sekaligus pragmatis, yang mempertimbangkan dinamika demokrasi, tantangan elektoral modern, dan adaptasi strategi politik. Fokus pada partai-partai seperti PKS, PPP, dan PAN memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap pluralitas ekspresi politik Islam di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur politik

Islam dengan memosisikan partai Islam tidak semata sebagai representasi ideologis, tetapi juga sebagai aktor politik rasional yang beradaptasi dalam kompetisi demokrasi. Dengan demikian, studi ini membuka ruang baru dalam pemahaman hubungan antara agama dan politik dalam sistem demokrasi modern Indonesia.

Pancasila dengan semangat sekuler memberikan kesan seakan-akan Islam politik tidak lagi mendapat tempat di Indonesia. Meskipun demikian, itu cuma terbatas pada tatanan fakta, bukan masuk pada tatanan formalitas. Sehingga keberadaan politik Islam Indonesia berada dalam tatanan dialektika ideologi Pancasila. tetapi, keinginan untuk menjalankan negara Islam akan selalu ada dalam masyarakat Indonesia. Namun memilih sekularisme bukanlah pilihan yang buruk bagi Indonesia karena hubungan Islam dan politik.<sup>4</sup> Disisi lain, peran partai politik

terutama partai-partai Islam tetap akan menghiasi persoalan politik di Indonesia. Bahkan partai-partai Islam bisa menjadi petunjuk bahwa politik Islam masih berkembang di Indonesia.<sup>5</sup>

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah partai politik Islam. Penguraian dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan dan fokus pada pemahaman dan masalah dalam problematika partai politik Islam khususnya yang ada di Indonesia.

## Pembahasan dan Diskusi

### Politik Menurut Perspektif Syari'ah

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasa*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku

<sup>4</sup> Efendy Bakhtiar, "Repolitisasi Islam". Dalam A. Suryana Sudrajat, ed., *fenomena Partai Islam*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 205.

<sup>5</sup> Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 326.

para ulama dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. *Siyasah* juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah. Sedangkan secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syari'at. Menurut Ibn 'Aqil sebagaimana dikutip oleh Ibn Qayyim, politik islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan.<sup>6</sup> Pandangan politik menurut syari'ah realitasnya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar bersikap netral, hanya saja setiap ideologi seperti Islam, kapitalisme, dan sosialisme punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka sehingga muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu tidak lagi menjadi netral.

<sup>6</sup> A Jazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah*,

Dari sudut pandang Syari'ah, politiklah yang menjadikan Syari'ah sebagai titik awal, mengekstraksi dan bergantung padanya, menerapkannya di bumi, menanamkan ajaran dan prinsipnya di antara orang-orang, dan menetapkan tujuannya, dan sistemnya. Menurut konsep modern, syari'ah dapat diartikan sebagai pengaplikasian tujuan Islam terhadap sistem politik, baik berupa kebijakan pemerintah, atau peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk peraturan. Itulah sebabnya Syari'ah Islam dianggap sebagai solusi ideal. atas nama negara.

Beberapa prinsip utama politik menurut syari'ah adalah sebagai berikut: 1) Kepemimpinan yang adil. Pemimpin harus adil, jujur dan bertanggung jawab. Pemimpin juga harus mengutamakan kesejahteraan umat dan menjalankan tugasnya dengan keadilan dan

---

(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 28.

kebijaksanaan. 2) Konsultasi atau musyawarah. Syari'ah mendorong adanya partisipasi aktif umat dalam pengambilan keputusan politik. Konsultasi dan musyawarah antara pemimpin dan rakyat menjadi penting dalam menentukan kebijakan yang terbaik untuk kepentingan umat. 3) Keadilan sosial. Politik menurut syariah menekankan pentingnya keadilan sosial. 4) Kebebasan Individu. Politik syari'ah mengakui kebebasan individu dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh islam. Politik syariah mendorong perlindungan terhadap hak-hak individu seperti kebebasan beragama, berbicara, dan berpendapat selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 5) Perlindungan hak minoritas. Islam mengajarkan perlakuan yang adil dan persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang lainnya.

Menurut teori Donald K. Emmerson mengatakan bahwa "Islam tanpa kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap" atau Muslim tanpa berjuang mewujudkan negara Islam merupakan umat yang tidak melakukannya untuk negara Islam. Artinya, organisasi Islam yang berhaluan keras mengatakan bahwa Islam dan politik tidak bias terpisahkan, sebab mereka meyakini bahwa Islam tanpa kekuatan adalah Islam yang tidak lengkap. Dalam keadaan saat ini, orang harus bertanya pada diri sendiri, apakah formalitas Negara Islam berlaku hari ini.<sup>7</sup> Itulah sebabnya sebagian umat Islam menganggap hukum Islam relevan setiap saat, dalam segala situasi dan di semua tempat. Pentingnya hukum Islam ditegaskan oleh banyak argumentasi yang berupa wahyu, maupun bukti realis. disisi lain ada juga yang percaya kalau hukum Islam tidak relevan dengan keadaan politik saat ini. Tokoh ini antara lain adalah Abduh

---

<sup>7</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam*, terjemah Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2006).

seorang pemikir kontemporer berhaluan moderat, dia menegaskan kalau “organisasi politik tidak ditentukan oleh ajaran Islam tetapi oleh situasi dan zaman”. Lantas apa sistem politik yang harus diterapkan di negara Indonesia yang masyarakatnya lebih banyak beragama Islam ini. Haruskah kita memaksakan pendirian negara Islam atau mempertahankan sistem politik saat ini yang biasanya sekuler.

Jika ingin mengikuti pandangan Qardawi, maka hukum Islam atau negara Islam perlu menjadi asas ideologis Indonesia. Akantetapi apakah Negara Islam penting bagi budaya majemuk masyarakat Indonesia? Melihat dalam sejarah perpolitikan Indonesia, percakapan negara Islam sudah eksis ketika dasar negara dibentuk, meski pada endingnya kegagalan justru berpihak pada politik Islam. Pancasila berkembang menjadi ideologi negara yang bernafaskan sekuler. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa pembentukan pancasila bukanlah ungkapan keinginan untuk memisahkan agama

dari negara. Karena asas “Ketuhanan yang Maha Esa” yang tertanam di dasar negara, maka Indonesia dianggap “negara Islam”. Namun sebenarnya Pancasila bersifat sekuler, meskipun masih terdapat beberapa sila teologis. Perkembangan seterusnya menjadi sulit kalau formalitas kebijakan negara islam dipaksakan masuk pada konstitusi politik Indonesia. Tetapi, sementara itu, keinginan dan bentuk politik Islam formal tetap eksis di Indonesia, meski cuma di daerah tertentu yang menjadi bagian dari NKRI. Tapi itu tidak mengarah pada proses pembuatan negara Islam secara menyeluruh. Meski beberapa daerah menggunakan syariaah Islam menjadi dasar politik, bukan berarti negara mengikutinya.

Sedangkan definisi partai politik adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai tujuan politik melalui partisipasi dalam

proses politik.<sup>8</sup> Mereka merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena mereka menyediakan wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi secara politik dan mengorganisir opini dan aspirasi rakyat. Partai politik berperan dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan publik, mengusulkan kandidat untuk pemilihan umum, serta mengawasi pemerintah.

Difinisi partai politik dapat berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lain tergantung pada konteks politik, budaya dan sistem politik yang ada.<sup>9</sup> Namun ada beberapa ciri umum yang menggambarkan partai politik yaitu:

- 1) Organisasi. Partai politik biasanya terstruktur dalam bentuk organisasi dengan struktur hirarkis. Mereka memiliki pemimpin, kepengurusan, dan anggota yang terlibat dalam kegiatan politik partai.
- 2) Ideologi dan platform. Partai politik umumnya memiliki

pandangan dan ideologi politik tertentu yang menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan agenda politik. Mereka menyusun platform politik yang berisi serangkaian posisi, program, dan tujuan yang ingin mereka capai jika memperoleh kekuasaan. 3) Partisipasi dalam pemilihan. Partai politik biasanya mencalonkan kandidat mereka untuk pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, legislatif, atau pemilihan lokal. Mereka berusaha untuk mempengaruhi pemilihan dengan meraih dukungan dari pemilih dan mendorong kandidat mereka agar terpilih. 4) Pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Partai politik memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Anggota partai yang terpilih menjadi anggota parlemen atau pejabat pemerintah berperan dalam mengusulkan, membahas dan mengesahkan undang-undang atau kebijakan publik.

<sup>8</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

Representasi dan artikulasi. Partai politik berfungsi sebagai perwakilan dan penyalur aspirasi warga negara. Mereka menyediakan mekanisme untuk warga negara mengorganisir diri dan mengungkapkan pandangan politik mereka melalui partisipasi dalam partai atau mendukung partai tertentu yang mewakili nilai-nilai dan tujuan mereka.

### **Tantangan dan Problematika Partai Islam**

Rangkaian kemajuan partai-partai Islam pasca reformasi, nampaknya selain anggapan bahwa peningkatan Islamisasi di negara Indonesia tidak berhubungan positif dengan meningkatnya suara partai Islam, tetapi terdapat fakta politik lain yang mendukung hal tersebut. bukti juga. terjadi Fakta politiknya adalah bahwa sementara partai-partai Muslim berkuasa dalam pemilihan parlemen tahun 1999-2009, kehadiran mereka di pemerintahan tidak banyak membantu suara partai Muslim. Padahal, ketika berkuasa, partai-partai Islam memiliki sumber daya dan modal yang memadai untuk biaya partai politik yang tidak

murah. Mereka bisa juga memakai dana pemerintah guna memperkuat program partainya. selain dari itu, ketika partai muslim berkuasa, masyarakat diyakini bisa diuntungkan karena dapat berpartisipasi dalam kegiatan dan agenda pemerintah. Tetapi kelihatannya kebangkitan partai Muslim berkuasa tidak bias membantu meningkatkan suara mereka dalam pemilu. Mereka memiliki hak untuk mempertahankan suara mereka hanya jika mereka melewati ambang pemilihan dan parlemen. Sebagai contoh, kita bisa mengambil kasus Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjadi sponsor utama pencalonan SBY dan JK pada 2004. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PBB turun signifikan dan tidak jelas. hambatan di parlemen. Faktor-faktor lain mungkin turut menyebabkan "bencana" politik ini, seperti pemecatan (2006) Yusril Ihza Mahendra sebagai Sekretaris Negara. Namun secara umum, partai-partai Islam menghadapi fenomena yang sama, yakni penurunan perolehan

hak suara dibandingkan pemilihan umum di tahun 2004, kecuali Partai Demokrat, perolehan suara parpol mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meski hampir seluruh partai, kecuali PDIP masuk pemerintahan saat itu, cuma partai demokrat yang suaranya tiga kali lipat.

Kemenangan Partai Demokrat saat pemilu tahun 2024 sebesar 7,45%, dan saat pemilu tahun 2009 perolehan suaranya meningkat drastis menjadi 20.85%. disini tampak bahwa hanya Partai Demokrat yang mendapat keuntungan dari keberhasilan pemerintahan presiden Susilo dan Jusuf Kalla. Koalisi partai-partai pendukung, termasuk Golkar, tidak memperoleh suara mayoritas atau meningkat pada Pemilu 2009.

Fenomena tersebut kemungkinan akan terulang pada 2014. Bergabungnya semua partai muslim dalam koalisi pendukung Susilo Bambang Yudoyono tidak mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap perolehan elektoral partai muslim pada

pemilihan yang akan datang. Hal ini dapat kita amati dari beberapa hasil survei yang saat ini dipublikasikan. Faktor lain penyebab terus merosotnya perolehan suara partai-partai Muslim karena sulitnya mendapatkan topik yang strategis untuk diperjuangkan dalam kontestasi pemilu. Sekalipun rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam, isu implementasi formal Syariah Islam di tingkat negara melalui upaya menggabungkan Piagam Jakarta ke amandemen undang-undang 1945, maupun melalui peraturan daerah yang bersifat Syar'i telah dikemukakan, tetapi sepertinya tidak menarik banyak perhatian dan dukungan publik. Padahal, dalam proses amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, hanya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang yang antusias memberikan dukungan usulan Piagam Jakarta tetapi, upaya untuk mengintegrasikan Piagam Jakarta ke dalam amandemen konstitusi tahun 1945 gagal.

Ormas Islam yang moderat di Indonesia seperti Muhammadiyah

dan NU tidak hanya mendapat dukungan dari pihak lain, tetapi juga belum mendukung upaya tersebut.<sup>10</sup> Padahal, isu terkait formalisasi syariah Islam sampai sekarang masih menjadi isu yang sensitif dan kurang mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. masyarakat lebih tertarik terhadap isu politik yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka dan perubahan masa depan negara Indonesia. Sebagai satu-satunya partai Islam yang memperoleh suara luar biasa pada pemilihan tahun 2004, PKS tidak berkampanye untuk menegakkan Syari'ah Islam. Kampanyenya, yang berselogan "Bersih dan Peduli", terbukti menarik perhatian masyarakat. Giora Eliraz, mengatakan kemenangan PKS pada pemilihan umum tahun 2004, karena mampu membuat citra sebagai partai antikorupsi dan bersih yang peduli terhadap persoalan rakyat. Mereka berusaha juga untuk menampilkan

diri sebagai partai Islam yang transparan dan pluralistik.<sup>11</sup>

Syariat Islam saat ini, harus sedikit membahas tentang fenomena permukiman teritorial Islam yang tetap berlaku di Indonesia pasca reformasi. Sementara perjuangan untuk menerapkan syariah Islam di tingkat negara runtuh dengan amandemen konstitusi (1945) pada tahun 2002, perjuangan untuk menerapkan syariah Islam tampaknya belum berhenti. Mereka terus berusaha di tingkat regional melalui kerja sama kelompok Islam radikal dengan partai politik. tetapi, usaha peraturan daerah Syariat itu tidak cuma permainan partai Islam, banyak partai yang berideologi nasionalis, misalnya partai Demokrat dan Golkar, juga menyetujui pengesahan perda ini. Robin Bush yang telah melakukan studi ekstensif mengenai hal tersebut, dukungan terhadap partai nasionalis berkaitan dengan pragmatisme politik untuk

<sup>10</sup> Luthfi Assyaukarie, "The Rise of Religious Bylaws in Indonesia", *RISS Commentaries*, 29 Maret, 2007.

<sup>11</sup> Giora Eliraz, *Islam and Party in Indonesia: An Intriguing Case Study*, Research

Monographs on the Muslim World, Series No 1. Paper No 5, February 2007, hlm. 12.

mendapatkan dukungan elektoral di berbagai pilkada. Mereka mendukungnya karena menunjukkan identitas dan keharmonisan mereka dengan masyarakat muslim.<sup>12</sup> Tetapi, jika melihat perolehan pemilu tahun 2009, partai Islam belum banyak diuntungkan dengan dukungan syariat Islam. Oleh karena itu, tampaknya syariat Islam bukanlah isu yang tepat bagi partai Islam. Partai-partai Islam perlu lebih serius mempertimbangkan topik yang strategis apa kira-kira sekarang yang menarik minat dan perhatian masyarakat.

### **Partai Islam sebagai Petunjuk Politik Indonesia**

Keterlibatan umat Islam dalam perpolitikan menghiiasi panggung politik negara, sebelum negara merdeka dan sistem politik demokrasi moderen telah berdiri sejak tahun 1929 terdapat bukti bahwa partai serikat Islam Indonesia

(PSII) didirikan untuk menjadi wadah perjuangan kemerdekaan dari penjajah. selanjutnya, pada tahun 1945, didirikanlah partai Islam masyumi yang mejadi satu-satunya tempat perjuangan Islam di bidang politik, meskipun partai tersebut kemudian terpecah setelah pemisahan NU dan PSII.<sup>13</sup>

Perjalanan selanjutnya, pihak muslim mengalami pasang surut. Hal itu terlihat saat masa orde lama, ketika Sukarno menggantikan keberadaan masyumi di peta politik Indonesia. Begitu juga saat masa orde baru, ketika orde baru membentuk reorganisasi system kepartaian tahun 1973. Penyusunan ulang itu memaksa semua partai meleburmenjadi satu, baik partai yang berideologi Islam maupun yang nasionalis. Setelah ketetapan ini, partai-partai Indonesia, termasuk partai Islam, harus bersandar pada pancasila, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi partai-partai Islam yang secara resmi

<sup>12</sup> Bernhard Plattdasch, *Islamism in Indonesia: Politic in the Emerging Democracy*, Singapore: ISEAS, 2009, hlm. 336.

<sup>13</sup> Effendy Bahtiar, "Repolitisasi Islam", dalam A. Suryana Sudrajat, ed.,

*Fenomena Partai Islam*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 205.

memiliki suara Muslim. Aspirasi Muslim saat ini terletak di dalam bermacam golongan politik dan sosial. Dulu partai yang berideologi islam sering dianggap mewakili umat islam, sehingga keinginan masyarakat sering disamakan dengan keinginan partai, padahal seharusnya tidak demikian, sebab hanya sebagian umat Islam yang bergabung dengan partai islam.<sup>14</sup>

Pasca tumbangnya orde baru, banyak partai berideologi islam bermunculan. Terjadinya kemunculan partai-partai islam bersifat spekulatif. Beberapa melihatnya sebagai "kembalinya Islam ke dunia politik". Ada juga yang langsung mengungkapkan keprihatinannya bagian dari "gagasan politik" tentang ketakterpisahan agama, hukum, ekonomi dan politik, menggunakan Oliver Roy. Yang jelas saat ini adalah kebangkitan kehidupan politik islam sebagai peristiwa yang bisa digambarkan sebagai politisasi islam.

<sup>14</sup> Lukman Harun, "Mulai ditinggalkan Aspirasi Umat Islam Lewat

Namun jika melihat indikator utama yang melatarbelakangi penilaian tersebut, yaitu munculnya beberapa partai yang memakai ideologi Islam dan prinsip-prinsip islam atau pendukung utama organisasi muslim, maka tidak salah jika yang dimaksud adalah kebangkitan. Wajar jika munculnya partai islam dipandang sebagai proses polarisasi Islam, karena selama tiga puluh dua tahun partai islam mengalami restriksi orde baru dan kembalinya kekuatan politik islam telah menginspirasi kancah politik indonesia.

Kebangkitan partai-partai islam bias dijadikan indikator kembalinya politik islam. Romantisasi politik islam masa lalu di konstituante mengingatkan para aktivis politik Muslim untuk mengangkat persoalan politik. Kini perjuangan bukan hanya diarahkan pada tatanan konstitusional, tetapi juga telah merambah tatanan ideologis partai islam. Meskipun

---

*Kelembagaan Formal*", Kompas, 22 Oktober, 1986.

Pancasila tetap menjadi dasar negara, bukan berarti partai-partai juga berlandaskan pancasila, melainkan berlandaskan islam. Dalam situasi sekarang ini, timbul pertanyaan apakah partai Islam benar-benar bisa menyesuaikan dengan keinginan umat islam dan apakah aspirasi rakyat identik dengan partai? Partai-partai Muslim dulu dianggap sebagai keinginan umat Islam karena para pemimpin dan aktivis politik Muslim awal mengandalkan dua karakteristik utama. Pertama, politik non-inklusif atau partisan, di mana politik partisipatif berkaitan langsung dengan pengelompokan politik Islam sebagai kekuatan politik, seperti partai yang dimonopoli oleh partai-partai Islam. Kedua, parlemen sebagai arena bermain dan arena pertempuran. Kelompok-kelompok Islam menjelaskan tujuan sosial-politik mereka, yang tidak bersifat integratif maupun partisan. Ini termasuk menetapkan islam sebagai dasar

ideologi negara dan menuntut agar piagam jakarta diberlakukan.<sup>15</sup>

Islam pada era orde baru lebih bersifat kultural daripada politis. Padahal, islam indonesia masih memiliki karakter politik. Bentuk maupun rumusan partai islam meliputi: *Pertama*, landasan filosofis dan teologis politik islam. *Kedua*, tujuan politik Islam. *Ketiga*, pendekatan politik terhadap Islam berubah dari kebijakan formalisme-legalisme menjadi substantifisme, atau dari kebijakan eksklusif menjadi inklusi. Perubahan model politik Islam dari politik formalitas menjadi politik substansi akan berdampak terhadap perjalanan politik Islam pada periode selanjutnya. Dengan demikian, substantivisme politik mulai mendapatkan pijakan dalam budaya politik Indonesia, bahkan ketika partai Islam yang mempertahankan politik formalis muncul. Lihatlah perjuangan Islam sebagai dasar ideologi negara, semakin sulit diimplementasikan.

<sup>15</sup> Sudirman Tebba, "Islam di Indonesia: Dari Minoritas Politik menuju

Mayoritas Budaya", *jurnal Ilmu Politik*, No. 4. 1989, hlm. 53-56.

ideologi sekuler Pancasila berakar pada sistem politik Indonesia.

Situasi saat ini, begitu sulit untuk berpendapat kalau partai Islam adalah tempat aspirasi umat Islam karena partai-partai Islam sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Kecenderungan saat ini adalah ke arah kepentingan individu politisi Muslim daripada kebutuhan umat. Sehingga bias dikatakan model bisnis partai Islam menuju ke arah pragmatis. Tokoh-tokoh politik (termasuk politisi Muslim) sama-sama berusaha menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat perebutan kekuasaan, kadang sinis tapi kebanyakan masuk akal. Ketika masyarakat sadar bahwa dia adalah anggota organisasi politik berbasis agama. Kemudian individu beranggapan bahwa kepentingan pribadinya sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan agamanya. Elit politik muslim di Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi seperti itu.

Terlihat partai politik Islam saat ini hanya sekedar menjadi label karena masyarakat sebenarnya tidak

terlalu tau persis apa sebenarnya yang membedakan antara partai-partai Islam seperti PPP, PKS, PKB, dan PAN kecuali sekedar perbedaan tanda lambang dan warna. Meskipun masing-masing partai politik tersebut berhaluan Islam dengan ideologi yang berbeda tetapi hal tersebut tidak terlihat dalam perjuangan politik di tingkat legislatif, baik ditingkat Provinsi ataupun Kabupaten. Bahkan kalau melihat partai politik Islam hari ini bergabung dengan siapapun yang dianggap lebih menguntungkan bagi partai politik mereka masing-masing. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang berpengetahuan berpikir tidak adanya gunanya mendukung partai politik yang berideologi Islam kalau pada akhirnya hanya sekedar menjadi label guna mendapatkan dukungan dalam kontestasi pemilihan.

### **Kesimpulan**

Pada dasarnya, pemikiran politik Islam juga terbagi menjadi tiga aliran utama. Hampir semua ekspresi ideologi politik Islam tidak dapat dibedakan dari bayangan pikiran

bahwa: pertama, islam dan politik tidak dapat terpisahkan, Kedua, Islam dan politik dapat dipisahkan, ketiga, Islam dan politik memiliki hubungan yang sangat erat, namun bentuk hubungan tersebut tidak legal formalis melainkan substansialis. Gambaran tiga aliran pemikiran dalam system politik Indonesia. Pertama, dalam konteks Indonesia, sangat sulit menghilangkan keinginan para penggerak politik Islam untuk membentuk negara Islam, karena mereka percaya kalau islam dan politik tidak dapat terpisahkan, ada pula legitimasi budaya yang mendorong mereka untuk membentuk negara Islam jika mereka percaya bahwa masyarakat Indonesia menggunakan hukum Islam sebelum berdirinya negara tersebut. Kedua, konsep tersebut tidak berlaku bagi budaya Indonesia jika memahami tentang pemisahan Islam dan politik di Indonesia dalam konteks sekularisme agama. Karena itu, diperlukan konsep sekuler yang cocok diterapkan dengan budaya di Indonesia. Salah satunya adalah konsep sekularisme yang

dikemukakan oleh An Naim. Ketiga, kelompok ini saat ini berperan besar dalam percaturan politik Islam Indonesia, khususnya di partai-partai Islam. Keberadaan partai Islam ini menghidupkan ulang suasana politik islam di Indonesia. Namun tidak sedikit penggerak politik Muslim yang menggunakan ruang kesempatan ini buat kepentingan pribadinya

#### Daftar Pustaka

- A Jazuli, *Fikih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam*, terjemah Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2006).
- Assiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Medan: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Berhard Plattdasch, *Islamism in Indonesia: Politic in the Emerging Democracy*, Singapore: ISEAS, 2009.

- Effendy Bahtiar, "Repolitisasi Islam". Dalam A. Suryana Sudrajat, ed., *fenomena Partai Islam*, (Bandung: Mizan, 2000).
- Fox, Colm A., dan Jeremy Menchik. "Islamic Political Parties and Election Campaigns in Indonesia." *Party Politics* 29, no. 4 (July 2023): n.p. <https://doi.org/10.1177/13540688221091656>.
- Giora Eliraz, *Islam and Party in Indonesia: An Intriguing Case Study*, Research Monographs on the Muslim World, Series No 1. Paper No 5, February 2007.
- Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Lukman Harun, "Mulai ditinggalkan Aspirasi Umat Islam Lewat Kelembagaan Formal", *Kompas*, 22 Oktober, 1986.
- Luthfi Assyaukarie, "The Rise of Religious Bylaws in Indonesia", *RISS Commentaries*, 29 Maret 2007.
- Makhasin, Luthfi. "Islamic Organisation and Electoral Politics: Nahdlatul Ulama and Islamic Mobilisation in an Indonesian Local Election." *PCD Journal* 12, no. 1 (2023): n.p. <https://doi.org/10.22146/pcd.29318>.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Nurhasim, Moch, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, dan Ridho Imawan Hanafi. "Masa Depan Partai Islam di Indonesia." *Journal of Political Research* 13, no. 2 (May 2025): 227-244. <https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.567>.
- Nurjaman, Asep. "Islamic Movements and the Future of Democracy in Post-Suharto Indonesia Era." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 1 (January 2023): 33-50.

- <https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.03>.
- Prastiwi, Juwita Hayyuning, dan Andy Ilman Hakim. "Women's Representation in Islamic Mass-Based Political Parties in Indonesia." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 6, no. 2 (August 2024): 207–234. <https://doi.org/10.15575/politicon.v6i2.33934>.
- Prihatin, Novianto Ari. "Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera)." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* 8, no. 1 (2020): n.p. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10769>.
- Qodir, Zuly, Misran Misran, dan Ahmad Sunawari Long. "Gender Equality in Indonesian Democracy amidst Islamic Conservatism and Islamic Populism." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 7, no. 2 (2023): 83–98. <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.17003>.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).
- Robert Michels, *Partai Politik: Kecendrungan Oligarkis dalam Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Schattschneider, E E, *The Semisovereign People: A realist's view of democracy in America*, Illionis: the Dryden Press Hinsdale, 1975.
- Sudirman Tebba, "Islam di Indonesia: Dari Minoritas Politik menuju Mayoritas Budaya", *jurnal Ilmu Politik*, No. 4. 1989.
- Ulum, Muhammad Bahrul. "Indonesian Democracy and Political Parties after Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis." *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (2020): n.p. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.577>.
- Yumitro, Gonda. "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 28, no. 2 (2024): n.p.

<https://doi.org/10.22146/jsp.10892>.

Yusuf Al-Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, terjemah Muhammad zaki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997).

Zoelva, Hamdan. "The Development of Islam and Democracy in Indonesia." *Constitutional Review* (2024): n.p. <https://doi.org/10.31078/con-srev812>.